

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, “Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Agus Yudha Hernoko, “Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Arie S. Hutagalung, “Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah”, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005).
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, (Jakarta: Djambatan, 2002).
- Gunanegara, “Pajak Tanah & Pungutan Persertipikatan Tanah, Perspektif Sejarah Hukum di Lapangan Hukum Pajak dan Hukum Agraria”, (eBooks: Jakarta, 2021).
- Harun Al- Rashid, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (berikut peraturan-peraturannya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- I Gusti Nyoman Guntur, “Pendaftaran Tanah”, (Yogyakarta: Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014).
- Idris Zainal, “Ketentuan Jual Beli Menurut Hukum Perdata”, (Medan: Fakultas Hukum USU).
- John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987).

- K. Wanjik Saleh, "Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000).
- Lukman Santoso Az, "Aspek Hukum Perjanjian", (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019).
- M. Yamin Lubis Dan Abdul Rahim Lubis, "Hukum Pendaftaran Tanah", (Mandar Madju, 2010).
- Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu Analisa dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis), (Jakarta: Republika, 2008).
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004).
- Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1996).
- Suryohadi, "Materi Studi Kasus Perpajakan I", (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).
- Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Ed. Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Jurnal

- Clarine Neonardi dan Gunanegara," Kepemilikan Hak Atas Tanah Terdaftar Yang Bersumber Dari Akta Nominee", Journal of Comprehensive Science Vol. 1 No. 4 November 2022.
- Fadhila Restyana Larasati dan Mochammad Bakri, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pada Putusan Hakim Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik", Program

Studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Konstitusi, Volume 15 Nomor 4 Desember 2018.

Gunanegara,” Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Indonesian State Policy Regarding Land Rights Post Law Of Job Creation)”, Jurnal Ilmu Hukum Vol.6, No.2 April 2022.

Nurul Khomariyah Syahroni dan Gunanegara,” Perlindungan Hukum Pemegang Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Kembali Sertipikat Atas Nama Pihak Ketiga Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, Notary Journal Vol.2, No.2 Oktober 2022.

Selamat Lumban Gaol, “Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah Dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden)”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Vol. 11 No. 1, 2020.

Soedikno Mertokusumo, “Hukum dan Politik Agraria”, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1988)

Website

Aplikasi Sentuh Tanahku

Asep Munazat Zatnika, “Kini, untuk buat sertifikat tanah harus punya NPWP”,

<https://nasional.kontan.co.id/news/kini-untuk-buat-sertifikat-tanah-harus-punya-npwp>

Helmi Romdhoni, “Peralihan Hak Atas Tanah Sudah Terjadi Meski Belum Disertifikatkan”, <https://www.inanews.co.id/2021/03/peralihan-hak-atas-tanah-sudah-terjadi-meski-belum-disertifikatkan/>

Kemenkeu Learning Center, “NIK menjadi NPWP, Bagaimana Ketentuannya?”, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/nik-menjadi-npwp-bagaimana-ketentuannya-744ad09a/detail/>

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, “Jenis –Jenis Peralihan Hak Atas Tanah”, <https://pdb-lawfirm.id/jenis-jenis-peralihan-hak-atas-tanah/#:~:text=Peralihan%20Hak%20Atas%20Tanah%20Melalui%20Jual%20Beli&text=Dalam%20KUHPperdata%20Pasal%201457%2C%201458,membayar%20harga%20yang%20telah%20ditentukan>
<https://loket.atrbpn.go.id/InputLoket/ListEntriBerkas>

Redaksi PajakOnline, “Hak dan Kewajiban sebagai Wajib Pajak”, <https://www.pajakonline.com/hak-dan-kewajiban-sebagai-wajib-pajak/>

Sandra, “Apa itu Wajib Pajak dan Apa Saja Kewajibannya?”. <https://www.pajakku.com/read/60caf50558d6727b1651aae5/Apa-itu-Wajib-Pajak-dan-Apa-Saja-Kewajibannya?>

Serial Referensi Modernisasi dan Perbaikan Kebijakan Administrasi Perpajakan Pemerintah Daerah: Standar Indikator Kinerja Administrasi Pajak Daerah (SIKAP), <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/10/Trampil-3.pdf>

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Soedaryo Soimin, S.H., cet.8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta
Perubahannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

